





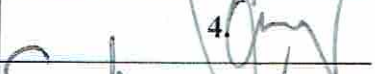

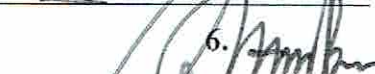



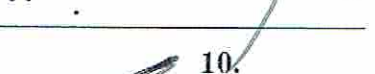


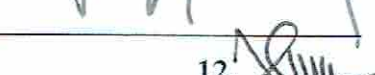



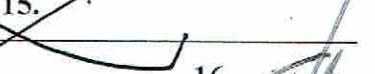
**RUMUSAN RAPAT KOORDINASI  
PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT  
Hari Selasa, Tanggal 8 Maret 2022**


---

Berkat Rahmat Allah, Subhanahu Wata'ala, Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat dengan tema “Sinergitas Pemerintah Daerah Dalam Mendukung *Visit Beautiful West Sumatera 2023*”, pada hari ini Selasa, 8 Maret 2022 telah dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pentahelix Pariwisata dan Hexahelix Ekonomi Kreatif sepakat berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan “*Visit Beautiful West Sumatera 2023*”
2. Untuk optimalisasi pelaksanaan “*Visit Beautiful West Sumatera 2023*”, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sepakat untuk memprioritaskan Bidang Pariwisata dalam perencanaan dan penganggaran APBDP Tahun 2022 dan APBD Tahun 2023.
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama melaksanakan event pariwisata sesuai dengan *Calender Of Event (COE)* yang telah dipublish oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) di 19 Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU).
5. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk Ekonomi Kreatif pada masing-masing Kabupaten dan Kota.
6. Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masing-masing Kabupaten dan Kota.
7. Mengkoordinir OPD terkait agar memberikan stimulant bagi pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa menciptakan *Hot Deals Package* (Bapenda, Dinas PMPTSP dan lain-lain).

Demikianlah rumusan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat ini disepakati, untuk dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait sebagaimana mestinya.

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Mahyeldi	Gubernur Sumatera Barat	1. 
Andy Joinaldy	Wakil Gubernur Sumatera Barat	2. 
Rusma Yul Anwar	Bupati Pesisir Selatan	3. 
Epyardi Asda	Bupati Solok	4. 
Benny Dwifa Yuswir	Bupati Sijunjung	5. 
Eka Putra	Bupati Tanah Datar	6. 
Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	7. 
Andri Warman	Bupati Agam	8. 
Safaruddin Dt. Bandaro Rajo	Bupati Lima Puluh Kota	9. 
Benny Utama	Bupati Pasaman	10. 
Yudas Sabaggalet	Bupati Kep. Mentawai	11. 
Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Bupati Dharmasraya	12. 
Khairunas	Bupati Solok Selatan	13. 
Hamsuardi	Bupati Pasaman Barat	14. 
Hendri Septa	Walikota Padang	15. 
Zul Elfian Umar	Walikota Solok	16. 
Deri Asta	Walikota Sawahlunto	17. 
Fadly Amran	Walikota Padang Panjang	18. 

Erman Safar	Walikota Bukittinggi	18
Riza Falepi	Walikota Payakumbuh	19.
Genius Umar	Walikota Pariaman	20. 

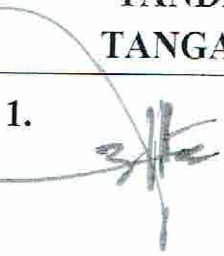

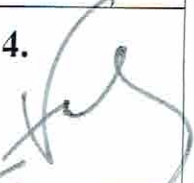
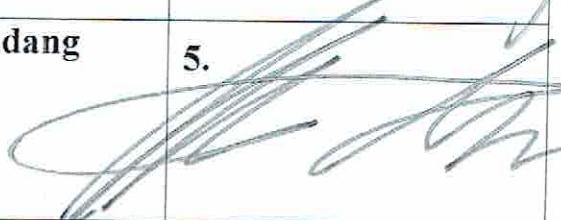
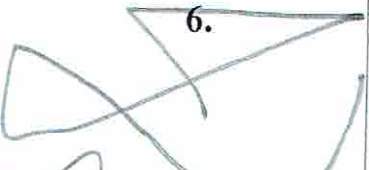
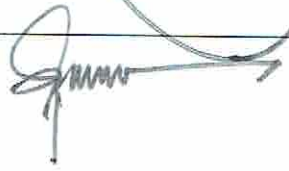
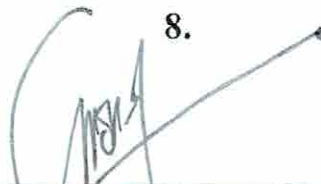
**RUMUSAN RAPAT KOORDINASI  
PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT  
Hari Senin, Tanggal 6 Juni 2022**


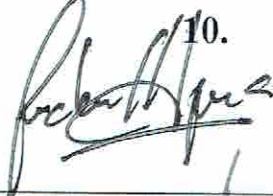
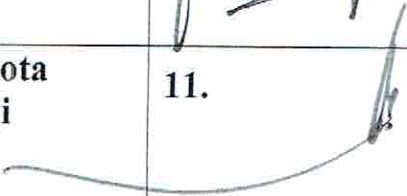
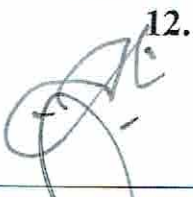






---

Dengan Rahmat Allah, Subhanahu Wata'ala, Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan materi : Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat ke XVI, Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat, Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, pada hari ini Senin, 6 Juni 2022 telah dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat bahwa Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat ke XVI tetap dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Pengunduran diri Kabupaten Tanah Datar sebagai tuan rumah Pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat ke XVI dapat diterima.
3. Gubernur, Bupati dan Walikota sepakat bahwa tuan rumah pelaksana Porprov ke XVI Tahun 2023 adalah Kota Padang dan Kota Padang Panjang.
4. Untuk menanggulangi darurat sampah maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sepakat melaksanakan gerakan SUMBAR BERSIH dengan :
  - a. Meningkatkan pelayanan melalui penambahan SDM dan anggaran pengelolaan sampah (minimal 2 persen APBD) serta menerapkan manajemen pengelolaan sampah berbasis nagari.
  - b. Menetapkan lokasi daerah strategis darurat sampah sebagai target pendampingan intensif melalui pembentukan Satgas dan kelompok pengelolaan sampah dengan melibatkan LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat lokal.
5. Gubernur, Bupati dan Walikota akan mendukung pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 dalam bentuk dukungan anggaran APBD 2023 dan APBD 2024, SDM dan sarana prasarana serta pemutakhiran data pemilih.
6. Ada standar penganggaran yang dibahas bersama oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta KPU Provinsi dan Bawaslu Sumatera Barat.

Demikianlah Rumusan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ini disepakati, untuk dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait sebagaimana mestinya.

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
MAHYELDI	Gubernur Sumatera Barat	1. 
KHAIRUNAS	Bupati Solok Selatan	2.
MARTINUS D	Pj Bupati Kepulauan Mentawai	3. 
FADLY AMRAN	Walikota Padang Panjang	4. 
HENDRI SEPTA	Walikota Padang	5. 
ZUL ELFIAN UMAR	Walikota Solok	6. 
RAHMANG	Wakil Bupati Padang Pariaman	7. 
RUDI HARIYANSYAH	Wakil Bupati Pesisir Selatan	8. 

SABAR AS	Wakil Bupati Pasaman	9. 
RICHI APRIAN	Wakil Bupati Tanah Datar	10. 
MARFENDI	Wakil Walikota Bukittinggi	11. 
ZOHIRIN SAYUTI	Wakil Walikota Sawahlunto	12. 
WIDYA PUTRA	a.n. Bupati Lima Puluh Kota Sekretaris Daerah	13. 
HENDRA PUTRA	a.n. Bupati Pasaman Barat Sekretaris Daerah	14. 
ZEFNIHAN	a.n. Bupati Sijunjung Sekretaris Daerah	15. 
RIDA ANANDA	a.n. Walikota Payakumbuh Sekretaris Daerah	16. 
JETSON	a.n. Bupati Agam Asisten II	17. 
YEFRINALDI	a.n. Bupati Dharmasraya Asisten II	18. 

	<b>a.n. Bupati Solok Sekretaris Daerah</b>	<b>19.</b>
	<b>a.n. Walikota Pariaman Sekretaris Daerah</b>	<b>20.</b>

**DISAKSIKAN :**

**WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



**H. IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed.**

**RUMUSAN RAPAT KOORDINASI  
PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT  
Hari Kamis, Tanggal 8 September 2022**


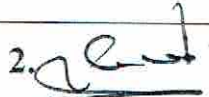



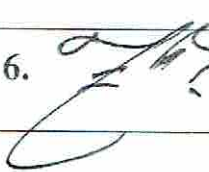

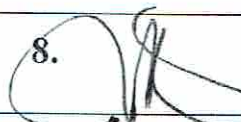



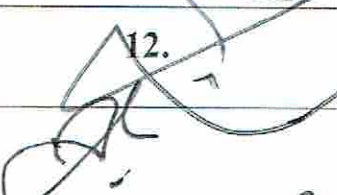




---


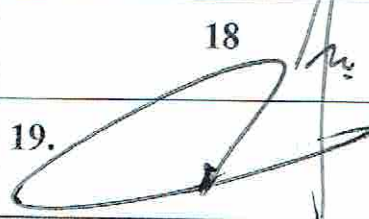

Berkat Rahmat Allah, Subhanahu Wata'ala, Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se Sumatera Barat dengan tema "Perencanaan dan Penganggaran Standar Penerapan Minimal (SPM) dan Urgensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)", pada hari ini Kamis, 8 September 2022 telah dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyepakati pemenuhan anggaran untuk kinerja SPM dalam APBD masing-masing setiap tahunnya.
2. Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perda APBD Kabupaten/Kota guna melihat dan memastikan alokasi anggaran kinerja SPM, jika tidak mencukupi/tersedia maka Pemprov merekomendasikan pemenuhan anggaran kinerja SPM. Kabupaten/Kota sepakat memenuhi/menindaklanjuti anggaran SPM sesuai rekomendasi evaluasi RKPD dan APBD oleh Pemprov.
3. Data sasaran SPM adalah data riil yang ditetapkan oleh daerah setiap tahunnya dengan mempertimbangkan sasaran masyarakat prioritas (tidak mampu/miskin).
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu rujukan utama dalam penetapan data sasaran SPM.
5. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan kegiatan penyusunan LPPD dan kegiatan untuk mencapai kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam PP 13 Tahun 2019 dan Permendagri 18 Tahun 2020 dalam proses perencanaan dan penganggaran sampai ditetapkan APBD.
6. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen melalui Dinas Kominfo dan Statistik untuk menggunakan Aplikasi Satu Data Sumatera Barat dan menyiapkan keputusan kepala daerah terhadap produsen (OPD penanggungjawab data).
7. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya.
8. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan SDM penyusun LPPD dan Laporan SPM secara berkala setiap tahunnya.



Demikianlah rumusan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se Sumatera Barat ini disepakati, untuk dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait sebagaimana mestinya.

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Audy Joinaldy	Wakil Gubernur Sumatera Barat	1. 
Eka Putra	Bupati Tanah Datar	2. 
Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	3. 
Safaruddin Dt. Bandaro Rajo	Bupati Lima Puluh Kota	4. 
H. Hamsuardi	Bupati Pasaman Barat	5. 
Irwan Fikri	Wabup Agam	6. 
Sabar AS	Wabup Pasaman	7. 
Yulian Efi	Wabup Solok Selatan	8. 
Rudi Hariyansyah	Wabup Pesisir Selatan	9. 
Riza Falepi	Walikota Payakumbuh	10. 
Hendri Septa	Walikota Padang	11. 
Zul Elfian	Walikota Solok	12. 
Zohirin Sayuti	Wawako Sawahlunto	13. 
Asrul	Wawako Padang Panjang	14. 
Marfendi	Wawaliko Bukittinggi	15. 
Mardison Mahyuddin	Wawako Pariaman	16. 

Martinus D, S.Sos, MM	Pj. Bupati Kep. Mentawai	17.	
Zefnihan, AP, M.Si	Sekda Kabupaten Sijunjung	18	
H. Adliasman, S.Sos, M.Si	Sekda Kabupaten Dharmasraya	19.	
	Bupati Solok	20.	